

KELEMBAGAAN PERBENIHAN PADI DALAM UPAYA MENDUKUNG AGRIBISNIS PADI DI JAMBI

Kebijakan pembangunan pertanian lima tahun kedepan di Provinsi Jambi difokuskan pada dua sasaran utama yaitu: a) mengembangkan sistem pangan berbasis kepada kemampuan produksi, keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal, b) mengembangkan agribisnis yang berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif produk-produk daerah berdasarkan kompetensi dan keunggulan komparatif sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.

Sub sektor tanaman pangan khususnya padi, fokus kebijakan operasional pada tahun anggaran 2001/2002 bertumpu pada lima program yaitu : a) peningkatan produktivitas, b) perluasan areal tanaman, c) pengaturan penerapan teknologi, d) peningkatan mutu intensifikasi dan e) peningkatan peran serta petani dalam investasi (Kanwil Dep. Pertanian, 2003).

Dalam upaya mendukung keberhasilan program di atas, peran perbenihan sangat strategis karena benih pada dasarnya merupakan sarana produksi utama penghasil produksi. Kelemahan dalam sistem produksi dapat menyebabkan kegagalan program peningkatan produksi. Perbenihan sebagai suatu sistem dengan sub sistem makro meliputi segala segi-segi pengaturan perbenihann di luar teknis produksi.

Kebutuhan benih khususnya padi di Provinsi Jambi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sejalan dengan program pembangunan areal

tanaman komoditas padi. Pada tahun 2003/2004 luas areal padi, adalah 23,6 ribu hektar. Luas areal tanaman tersebut pada tahun 2005/2006 mengalami perubahan. Luas areal tanaman padi mengalami peningkatan areal cukup tajam yakni 42,4 ribu hektar atau meningkat hampir 2 kali lipat dari sebelumnya.

Dengan penetapan sasaran areal tanam untuk komoditas padi, ketersediaan benih yang memadai sangat diperlukan. Benih yang diperlukan bukan saja harus memadai dari segi kualitas akan tetapi juga jaminan kualitasnya.

Untuk menghasilkan benih yang berkualitas,, banyak pihak yang terlibat. Struktur kelembagaan perbenihan terdiri dari berbagai institusi yang saling terkait dalam satu sistem kelembagaan perbenihan mulai dari Badan Litbang Pertanian yang menghasilkan benih perjenis (Breeder seed/BS), hingga penangkar benih. Kesemuanya itu mempunyai peranan yang besar dalam perbenihan.

Peran perbenihan sangat strategis bagi pertanian masa depan karena perbenihan mampu memenuhi kepentingan pertanian berpola dua (duopattern agriculture). Keberhasilan benih sangat strategis karena benih sebagai sarana teknologi maju harus mampu mewahanai tercapainya kebutuhan pangan, papan dan sandang bagi rakyat banyak serta mampu menjaga kelestarian berbagai ragam hayati.

Mekanisme kerja dari kelembagaan perbenihan ini melibatkan berbagai institusi, kelompok atau individu, baik yang dikelola oleh pemerintah, BUMN maupun swasta.

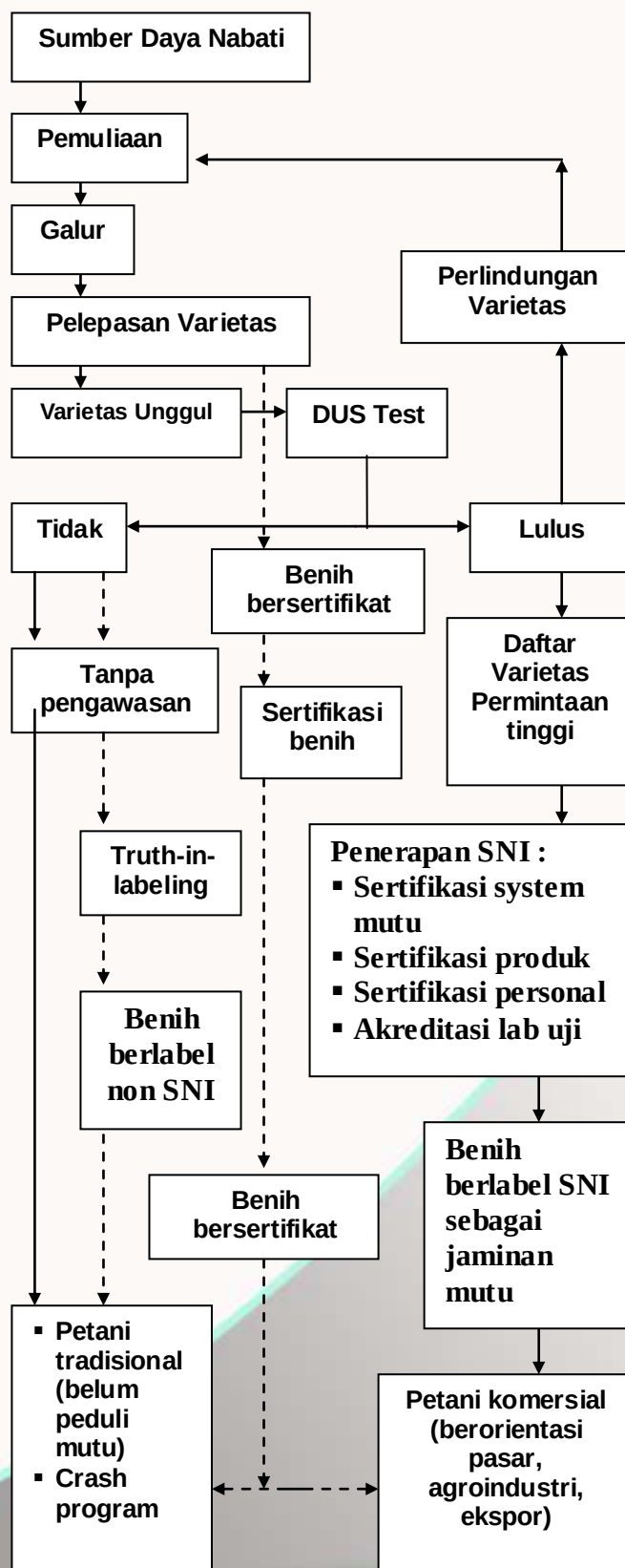


Berikut ini akan dirinci institusi-institusi yang terkait dalam sistem perbenihan nasional:

1. Badan Litbang Pertanian menciptakan benih pejenis (breeder seed/BS) yang dihasilkan para pemulia (Breeder) masing-masing komoditas.
2. Direktorat benih mengatur perbanyakan benih BS menjadi benih dasar (foundation seed/FS) atau benih pokok (stock seed/SS). Benih diperbanyak di Balai Benih Induk (BBI)
3. BBI memperbanyak benih BS dan menghasilkan benih FS melalui sertifikasi oleh BPSB.
4. BPSB berfungsi untuk menguji dan mengevaluasi mutu benih di pasaran dan memberikan sertifikasi.
5. BBU (Balai Benih Utama) berfungsi untuk memperbanyak benih FS dari BBI untuk menghasilkan benih sebar (extention seed/ES) yang akan disebarakan kepetani pengguna.
6. BUMN memproduksi benih sebar dan memasarkan kepada petani (sebagai contoh untuk benih padi adalah PT Sang Hyang Sri dan PT Pertani.

Koordinator yang baik antar institusi sangat diperlukan sehingga dapat mendukung keberhasilan program pembangunan pertanian nasional secara umum dan regional provinsi Jambi khususnya.

Diagram Sistem Pengendalian Mutu Benih



No: 14/Suharyon/2009



